

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Hasil Temuan Penelitian

4.1.1. Profil Singkat Perusahaan

PT. X adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan pada tahun 1973 setelah dilakukannya studi menyeluruh oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang berusaha untuk membuat sebuah model ramah lingkungan dan terintegrasi untuk tujuan wisata serta untuk membantu pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian. PT. X semula perusahaan yang hanya mengelola kawasan wisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun saat ini PT. X tidak hanya mengelola saja namun mengembangkan kawasan dari daerah terpencil dan terkebelakang menjadi kawasan yang bergengsi, promotif, dan menguntungkan serta mampu memberikan dampak berganda bagi masyarakat, dan Indonesia pada umumnya. Sumber pendapatan utama PT. X adalah dari pendapatan sewa lahan atau bangunan kepada pihak investor atau *tenant*, kemudian pendapatan lain-lain berasal dari jasa air irigasi, jasa air limbah, dan lain-lain. Pendapatan lain – lain ini muncul dikarenakan, kawasan di kelola PT. X sesuai dengan tujuannya menciptakan kawasan model ramah lingkungan atau *eco green*.

PT. X telah memperoleh berbagai penghargaan, diantaranya, penghargaan Kalpataru dari pemerintah RI, BUMN *Branding and Marketing Award 2016* dari BUMN *Track & Rumah Perubahan*, penghargaan Bidang Industri tahun 2016 oleh Kementerian Perindustrian, sertifikasi Tri Hita Karana dari Yayasan Tri Hita

Karana Bali dan sertifikasi “Green Globe” pertama di Dunia dibidang Kawasan Pariwisata oleh *Green Globe Foundation*, sebuah lembaga Dunia yang di *endorse* oleh PBB. Adapun jasa yang ditawarkan PT. X meliputi penyiapan lahan, yang dikerjasamakan dengan sistem BOT dengan investor baik dalam maupun luar negeri, untuk dikembangkan sebagai usaha akomodasi perhotelan, *condotel* serta fasilitas pariwisata lainnya yang menarik.

Terkait dengan perencanaan pajaknya sendiri, PT. X merencanakan penyusunan redaksi jurnal di tiap-tiap pos pendapatan (*revenue*) dan biaya (*expense*) hingga dalam bentuk nota atau *invoice*, diatur agar tidak rawan *grey view* atau penafsiran berbeda oleh pihak fiskus yang berakibat adanya pendapatan atau beban yang tidak diakui sehingga pajak terhutang semakin besar. Selain itu juga melakukan penyetoran dan pelaporan baik itu SPT Masa PPh pada tanggal 10 dan 20 bulan berikutnya serta SPT Masa PPN saat akhir bulan maupun SPT Tahunan Badan pada pertengahan April. Hal ini diatur sedemikian rupa menggunakan *Standard Operational Procedure* (SOP) sehingga dapat meminimalisir sanksi administrasi pajak.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. X adalah menjadikan pengembang destinasi pariwisata kelas dunia. Untuk menunjang hal tersebut maka misi yang dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang terpilih melalui kerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat.

2. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pengelolaan destinasi.
3. Menjadikan *brand equity* perusahaan sebagai indikator promosi destinasi pariwisata Indonesia melalui kerja sama dengan institusi Internasional.
4. Bersinergi dengan BUMN lain dalam pengembangan destinasi pariwisata.

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Hubungan PT. X Dengan Kawasan Ekonomi Khusus

PT. X merupakan perusahaan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola salah satu kawasan dalam wilayah KEK. Dalam KEK terdapat berbagai fasilitas salah satunya fasilitas di bidang perpajakan. Namun untuk memanfaatkan fasilitas ini, perusahaan harus memenuhi syarat – syarat sesuai dengan aturan yang berlaku di KEK. Adapun peraturan di wilayah KEK, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan PP ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas, antara lain :

1. Pasal 3, pada pasal ini diatur bidang usaha yang memperoleh fasilitas di KEK, meliputi :
 - a. Bidang usaha yang merupakan kegiatan utamanya di KEK; dan
 - b. Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK

Pada poin ini PT. X memenuhi syarat awal untuk memperoleh fasilitas dan kemudahan di KEK. Sebab PT. X bidang usaha yang kegiatan lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.

2. Pasal 5, pada pasal ini dijelaskan fasilitas yang didapatkan antara lain fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Untuk fasilitas perpajakannya sendiri berupa fasilitas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Syarat untuk menikmati fasilitas tadi sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), antara lain:
 - a. Memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Kota atau Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Memiliki perjanjian pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten atau Kota, atau Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.
 - d. Merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri.
 - e. Telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK.

Kemudian selain memenuhi syarat pada Pasal 5 ayat (3), Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK harus memiliki sistem informasi yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan

persyaratan pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PT. X memenuhi seluruh persyaratan sebab telah memiliki penetapan dan perjanjian pembangunan atau pengelolaan KEK dari Pemprov atau Pemkab atau Pemkot serta dari kementerian terkait.

3. Pasal 7, pada Pasal ini diatur terkait fasilitas pajak penghasilan dalam hal fasilitas pengurangan PPh Badan berkisar paling rendah 20% hingga yang tertinggi 100% dari jumlah PPh Badan terutang. Untuk memanfaatkan fasilitas ini perusahaan wajib memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
 - b. Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling

kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

- c. Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); bidang usaha beserta rantai produksinya merupakan Kegiatan Utama; dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

Terkait fasilitas ini jangka waktu pengurangan PPh Badan dan besaran pengurangan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara setelah mempertimbangkan usulan Wajib Pajak badan baru. Kemudian untuk besaran pengurangan yang akan diterima perusahaan menteri di bidang keuangan akan membentuk komite verifikasi. Untuk PT. X sendiri sangat mengharapkan untuk menikmati fasilitas ini dikarenakan besaran pengurang yang menggiurkan. Dalam pemanfaatan fasilitas ini, PT. X memenuhi salah satu syarat dari tiga syarat yang diatur dalam Pasal 7 (untuk besaran modal data dirahasiakan) ini. Sehingga PT. X memenuhi syarat untuk menikmati fasilitas pengurangan PPh Badan.

4. Pasal 10, pada pasal ini dijelaskan fasilitas pajak penghasilan yang dapat dimanfaatkan oleh WP, apabila tidak dapat menikmati fasilitas pengurangan

PPh Badan. Adapun fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam pasal ini, yaitu :

- a. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi komersial.
- b. Penyusutan yang dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan.
- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Dalam pasal ini PT. X dapat menikmatinya dengan syarat tidak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan. Sehingga secara jelas PT. X maupun WP badan yang berada di KEK dapat menikmati fasilitas ini.

Dalam pemanfaatan fasilitas di KEK, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Peraturan

PMK ini merupakan peraturan lebih spesifik terkait syarat untuk menikmati fasilitas di KEK. Ada beberapa syarat tambahan yang diatur dalam PMK ini, antara lain :

1. Pasal 3, dalam pasal ini diatur ketentuan lebih lanjut terkait syarat untuk menikmati fasilitas pengurangan PPh Badan. Persyaratan tambahan tersebut pada Pasal 3 ayat (6) serta ayat (7). Adapun syarat tersebut antara lain:
 - a. Penanaman modal baru mencakup juga perluasan atas penanaman modal baru sepanjang : perluasan atas penanaman modal baru dilakukan di KEK, bidang usaha perluasan atas penanaman modal baru merupakan Kegiatan Utama di KEK, nilai rencana perluasan atas penanaman modal baru memenuhi ketentuan.
 - b. Kepada Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan perluasan atas. penanaman modal baru dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan syarat :
 - a) Wajib Pajak badan baru tersebut telah diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penanaman modal baru.
 - b) Melakukan pembukuan terpisah atas penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru.
 - c) Menggunakan metode alokasi biaya bersama (*Joint cost allocation*) yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kemudian pada Pasal 4, diperjelas lagi kriteria yang dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan. Adapun kriteria atau syarat yang ditetapkan antara lain:

- a. Pada Pasal 4 ayat (1), Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan. Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Wajib Pajak Badan yang memenuhi kriteria :
 - a) Merupakan Wajib Pajak Baru.
 - b) Melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru.
 - c) Bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK.
 - d) Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
 - e) Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.
 - f) Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.
- b. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2), dijelaskan juga termasuk Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah Badan Usaha dengan syarat :
 - a) Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).

- b) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud hanya diberikan atas penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur.
- c) Sebagian atau seluruh pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud diatas, tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Pada Pasal 4 ayat (3), menjelaskan dalam hal Wajib Pajak badan dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.
- d. Pasal 4 ayat (4), menjelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) tidak berlaku, dalam hal Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1):
 - a) Dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b) Kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016. Maka PT. X tidak dapat menikmati fasilitas pengurangan PPh Badan dikarenakan tidak memenuhi kriteria pada Pasal 4

ayat (1), dalam poin harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. PT. X sendiri berbadan hukum di Indonesia tahun 1973. Kemudian untuk rasio perbandingan antara utang dan modal, memenuhi persyaratan sebab PT. X memiliki rasio hutang : ekuitas sebesar 1:7 (rasio hutang : ekuitas yang diijinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah 4:1, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan).

3. Pasal 21, pada pasal ini mengatur syarat umum untuk menerima fasilitas perpajakan, selain fasilitas pengurangan PPh Badan, seperti pengurangan penghasilan neto sebesar 30%, penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/ atau perluasan usaha yang digunakan untuk kegiatan pokok, pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku, kompensasi kerugian yang lebih lama 5 tahun tetapi tidak boleh lebih dari 10 tahun. Adapun syarat umum untuk memanfaatkan fasilitas tersebut antara lain :
 - a. Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

- b. Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
- 4. Pasal 22, pasal ini menjelaskan ketentuan pemanfaatan fasilitas perpajakan dalam hal fasilitas pengurangan penghasilan netto sebesar 30%. Ketentuan tersebut, sebagai berikut :
 - a. Fasilitas ini dibebankan sejak tahun pajak saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial.
 - b. Pemanfaatan fasilitas, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun dikalikan jumlah penanaman modal yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
- 5. Pasal 23, pada pasal ini menjelaskan ketentuan pemanfaatan fasilitas penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/ atau perluasan usaha yang digunakan untuk kegiatan pokok. Adapun ketentuan tersebut, antara lain :
 - a. Penghitungan fasilitas ini dimulai sejak bulan berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
 - b. Penghitungan penyusutan atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukan sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - c. Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah :

- a) Harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus.
- b) Nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.
- d. Tarif penyusutan dan amortisasi dipercepat sesuai dengan aturan dalam KEK.
- e. Masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa manfaat aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang –Undang Pajak Penghasilan dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 bulan penuh.
- f. Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva tetap baru adalah harga perolehan aktiva baru tersebut.

Kemudian ketentuan terkait fasilitas penyusutan ini, diatur pula dalam Pasal

24. Isi ketentuan tersebut antara lain :

- a. Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan ini dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara :
 - a) Jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, atau.

- b) Masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan.
 - b. Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan ini dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan.
6. Pasal 25, dalam pasal ini diatur ketentuan untuk memanfaatkan fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku. Ketentuan tersebut, antara lain :
- a. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
 - b. Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk/jasa yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan Juga menghasilkan produk/jasa yang tidak diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, besaran dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk/jasa yang

mendapat fasilitas Pajak Penghasilan terhadap total produk/jasa pada tahun dibagikan nilai penjualan pajak sebelum seluruh dividen.

- c. Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan ini sebanding dengan persentase nilai realisasi aktiva perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.
7. Pasal 26, pada pasal ini diatur ketentuan lebih lanjut terkait fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama 5 tahun tetapi tidak boleh lebih dari 10 tahun. Adapun ketentuan pemanfaatan fasilitas ini antara lain :
- a. Fasilitas Pajak Penghasilan ini dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan KEK.
 - b. Dalam hal Wajib Pajak dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan, sehingga Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang melebihi dari 5 (lima) tahun, besarnya tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang diberikan adalah paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - c. Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan ini, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

- d. Berdasarkan permohonan pada poin c diatas, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- e. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada poin c di atas dan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud poin di atas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- f. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud peraturan sesuai dengan penghitungan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
- g. Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian

sebagaimana dimaksud peraturan, dihitung dengan cara sebagai berikut

$$: KMF = \frac{BVMF}{(BVTf+BVMF)} \times TK$$

Keterangan :

- i. KMF : Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
 - ii. BVMF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
 - iii. BVTf : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian.
 - iv. TK : Total kerugian.
- h. Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam peraturan, dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$KMF = \frac{EAT}{BVAT} \times TK$$

Keterangan :

- i. KMF : Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
- ii. BVAT : BVMF + BVTf
- iii. EAT : Laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha
- iv. BVAT : Total nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap
- v. BVMF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian

- vi. BVTF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- vii. TK : Total kerugian tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial

Berdasarkan rincian persyaratan diatas, PT. X tidak dapat menikmati fasilitas perpajakan terkait fasilitas pengurangan PPh Badan. Namun dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang lain. Berdasarkan analisis peneliti, sebaiknya peneliti memanfaatkan fasilitas perpajakan terkait fasilitas pengurangan penghasilan netto 30% serta fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Sebab melihat situasi dan data serta penjelasan yang diberikan, perusahaan dalam 5 tahun terakhir diposisi laba, sehingga fasilitas penghasilan netto menjadi penting sebagai pembantu pengurang dari penghasilan kena pajak perusahaan. Kemudian terkait halnya dengan fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, akan membantu pengakuan beban yang lebih cepat sehingga mampu menghemat pajak terutang perusahaan. Sedangkan dua lainnya menurut peneliti untuk saat ini tidak dipertimbangkan sebab perusahaan tidak memiliki pemilik modal dari WP LN, sehingga pastinya tidak memanfaatkan fasilitas ini, kemudian untuk kompensasi kerugian berdasarkan yang dijelaskan diatas, posisi keuangan perusahaan yang saat ini dalam kondisi sehat membuat fasilitas kompensasi kerugian menjadi kurang elok. Terkait persyaratan pemanfaatan fasilitas pengurangan penghasilan netto 30% serta fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, perusahaan sudah memenuhi persyaratan baik dalam PP Nomor 96 Tahun 2015 serta Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 sebab perusahaan tidak dapat menikmati fasilitas pengurangan PPh Badan, yang menjadi syarat utama untuk menikmati fasilitas ini. Kemudian perusahaan juga telah mulai beroperasi di wilayah KEK, sehingga secepatnya kedua fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh PT.

X.

4.2.2. Penyajian Laporan Laba Rugi & Biaya Perusahaan

Tabel 4.1.

Laporan Laba Rugi (Komersial-Fiskal)& Koreksi Fiskal PT. X Tahun 2016

| NO | U R A I A N | Laporan Keuangan Komersial | Rekonsiliasi Fiskal | | | | Laporan Keuangan Fiskal |
|----|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | | | Positif | | Negatif | | |
| | | | Beda Tetap/Waktu | Proporsional | Beda Tetap/Waktu | Proporsional | |
| A | PENDAPATAN USAHA | | | | | | |
| | Pendapatan Utama. | | | | | | |
| | Kompensasi Minimum | 11.198.962.174 | - | - | 11.198.962.174 | - | - |
| | Kompensasi Persentase | 154.292.739.953 | - | - | 154.292.739.953 | - | - |
| | Kompensasi Sekaligus | 4.324.755.593 | - | - | 4.324.755.593 | - | - |
| | Penggantian Asosiasi | - | - | - | - | - | - |
| | Kompensasi Lainnya | 4.091.519.093 | - | - | 4.091.519.093 | - | - |
| | TOTAL Pendapatan Utama | 173.907.976.813 | - | - | - | - | - |
| | Pendapatan Tambahan. | | - | - | - | - | - |
| | Assessment | 22.301.814.313 | - | - | 22.301.814.313 | - | - |
| | Air Limbah | 10.297.386.151 | - | - | - | - | 10.297.386.151 |
| | Air Irigasi | 1.779.554.773 | - | - | - | - | 1.779.554.773 |
| | Pendapatan Conection Charge | 100.092.600 | - | - | - | - | 100.092.600 |
| | Pendapatan Lain-lain | 9.846.093.525 | - | - | 9.490.480.000 | - | 355.613.525 |
| | TOTAL Pendapatan Tambahan | 44.324.941.362 | - | - | - | - | 12.532.647.049 |
| | TOTAL PENDAPATAN | 218.232.918.176 | - | - | - | - | 12.532.647.049 |
| | | | - | - | - | - | |
| B | BEBAN USAHA | | - | - | - | - | |
| | Biaya Gaji Pegawai | 47.222.994.054 | 6.349.819.636 | 38.525.915.934 | - | - | 2.347.258.484 |
| | Biaya Alat Tulis | 988.581.277 | - | 931.809.181 | - | - | 56.772.096 |
| | Biaya Telekomunikasi | 719.973.694 | 93.688.983 | 590.318.527 | - | - | 35.966.184 |
| | Biaya Listrik | 2.176.763.536 | - | 2.051.756.689 | - | - | 125.006.847 |
| | Biaya Air | 38.881.852 | - | 36.648.951 | - | - | 2.232.901 |
| | Biaya Bahan Bakar dan Pelumas | 767.265.395 | - | 723.202.994 | - | - | 44.062.401 |
| | Biaya Rumah Tangga | 2.963.797.614 | 739.404.449 | 2.096.651.050 | - | - | 127.742.115 |
| | Biaya Perjalanan Dinas | 11.675.162.386 | 25.503.000 | 10.980.644.507 | - | - | 669.014.879 |
| | Biaya Konsultasi dan Pengawasan | 788.905.628 | - | 743.600.475 | - | - | 45.305.153 |
| | Biaya Rapat dan Jamuan Tamu | 2.152.030.672 | 1.279.805.215 | 822.135.425 | - | - | 50.090.032 |
| | Biaya Pemeliharaan Lapangan | 10.502.487.037 | - | 9.899.351.798 | - | - | 603.135.239 |
| | Biaya Pemeliharaan | 2.642.347.182 | - | 2.490.602.867 | - | - | 151.744.315 |
| | Biaya Promosi dan Penjualan | 6.423.901.946 | 522.478.057 | 5.580.935.669 | 19.540.000 | - | 340.028.220 |
| | Harga Pokok Tanah | 377.690.728 | - | 356.000.762 | - | - | 21.689.966 |
| | Biaya IBO | 1.848.002.072 | 1.516.752.072 | 312.227.025 | - | - | 19.022.975 |
| | Biaya Asuransi | 100.883.984 | - | 95.090.434 | - | - | 5.793.550 |
| | Biaya Sewa | 4.188.361.891 | 34.695.000 | 3.915.130.736 | - | - | 238.536.155 |
| | Biaya PBB | 1.860.602.738 | - | 1.753.752.325 | - | - | 106.850.413 |
| | Biaya laboratorium | 80.274.332 | - | 75.664.350 | - | - | 4.609.982 |
| | Biaya Kodak | 6.986.969.406 | - | 6.585.722.783 | - | - | 401.246.623 |
| | Biaya Jasa Produksi/Bonus | 7.499.999.999 | - | 7.069.291.132 | - | - | 430.708.867 |
| | Biaya PKBL | 979.366.044 | 979.366.044 | - | - | 0 | 0 |
| | Biaya Gaji dan biaya Direksi | 20.211.044.324 | 2.068.394.383 | 17.100.756.582 | - | - | 1.041.893.359 |
| | Penyusutan | 9.413.804.991 | 204.713.328 | 8.893.816.613 | 226.596.208 | - | 541.871.257 |
| | Amortisasi | 569.238.020 | - | 536.547.905 | - | - | 32.690.115 |
| | Biaya Pajak | 21.547.903.361 | 21.547.903.361 | (0) | - | - | -0 |
| | | | - | - | - | - | |
| | Total Biaya Adm & Umum | 164.727.234.163 | - | - | - | - | 7.443.272.128 |
| | | | - | - | - | - | |
| | PENDAPATAN/BIAYA LAIN | | - | - | - | - | |
| | Pendapatan bunga Bank | (36.485.590.187) | - | - | 36.485.590.187 | - | - |
| | Pendapatan Lainnya | (9.666.356.454) | - | - | 5.000.000.000 | - | (4.666.356.454) |
| | Penyisihan Kerugian Piutang | 4.354.540.000 | 4.354.540.000 | - | - | - | - |
| | Pendapatan Selisih Kurs | (86.064.436) | - | - | - | - | (86.064.436) |
| | Beban Non Operasional | 12.185.178.742 | 6.885.832.404 | 4.995.016.278 | - | - | 304.330.061 |
| | | | | | | | |
| | Total Pendapatan/Biaya lainnya | (29.698.292.334) | | | | | (4.448.090.829) |
| | | | | | | | |
| | Laba Sebelum Pajak | 83.203.976.347 | | | | | 9.537.465.750 |
| | | | | | | | 9.537.465.000 |
| D | PAJAK PENGHASILAN | | | | | | 2.384.366.250 |

Sumber : Data sekunder PT.X, 2016

Tabel 4.2.

Laporan Laba Rugi (Komersial) PT. X Tahun 2016

| NO | U R A I A N | Laporan Keuangan Komersial |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| A | PENDAPATAN USAHA | |
| | Pendapatan Utama. | |
| | Kompensasi Minimum | 11.198.962.174 |
| | Kompensasi Persentase | 154.292.739.953 |
| | Kompensasi Sekaligus | 4.324.755.593 |
| | Penggantian Asosiasi | - |
| | Kompensasi Lainnya | 4.091.519.093 |
| | TOTAL Pendapatan Utama | 173.907.976.813 |
| | Pendapatan Tambahan. | |
| | Assessment | 22.301.814.313 |
| | Air Limbah | 10.297.386.151 |
| | Air Irigasi | 1.779.554.773 |
| | Pendapatan Conection Charge | 100.092.600 |
| | Pendapatan Lain-lain | 9.846.093.525 |
| | TOTAL Pendapatan Tambahan | 44.324.941.362 |
| | TOTAL PENDAPATAN | 218.232.918.176 |
| | | |
| B | BEBAN USAHA | |
| | Biaya Gaji Pegawai | 47.222.994.054 |
| | Biaya Alat Tulis | 988.581.277 |
| | Biaya Telekomunikasi | 719.973.694 |
| | Biaya Listrik | 2.176.763.536 |
| | Biaya Air | 38.881.852 |
| | Biaya Bahan Bakar dan Pelumas | 767.265.395 |
| | Biaya Rumah Tangga | 2.963.797.614 |
| | Biaya Perjalanan Dinas | 11.675.162.386 |
| | Biaya Konsultasi dan Pengawasan | 788.905.628 |
| | Biaya Rapat dan Jamuan Tamu | 2.152.030.672 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | Biaya Pemeliharaan Lapangan | 10.502.487.037 |
| | Biaya Pemeliharaan | 2.642.347.182 |
| | Biaya Promosi dan Penjualan | 6.423.901.946 |
| | Harga Pokok Tanah | 377.690.728 |
| | Biaya IBO | 1.848.002.072 |
| | Biaya Asuransi | 100.883.984 |
| | Biaya Sewa | 4.188.361.891 |
| | Biaya PBB | 1.860.602.738 |
| | Biaya laboratorium | 80.274.332 |
| | Biaya Kodal | 6.986.969.406 |
| | Biaya Jasa Produksi/Bonus | 7.499.999.999 |
| | Biaya PKBL | 979.366.044 |
| | Biaya Gaji dan biaya Direksi | 20.211.044.324 |
| | Penyusutan | 9.413.804.991 |
| | Amortisasi | 569.238.020 |
| | Biaya Pajak | 21.547.903.361 |
| | | |
| | Total Biaya Adm & Umum | 164.727.234.163 |
| | | |
| | PENDAPATAN/BIAYA LAIN | |
| | Pendapatan bunga Bank | (36.485.590.187) |
| | Pendapatan Lainnya | (9.666.356.454) |
| | Penyisihan Kerugian Piutang | 4.354.540.000 |
| | Pendapatan Selisih Kurs | (86.064.436) |
| | Beban Non Operasional | 12.185.178.742 |
| | | |
| | Total Pendapatan/Biaya lainnya | (29.698.292.334) |
| | | |
| | Laba Sebelum Pajak | 83.203.976.347 |

Sumber : Data sekunder PT.X, 2016

Penjelasan terkait Laporan Laba Rugi Komersial 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Total pendapatan utama tahun 2016 berupa penyewaan tanah dan atau bangunan kepada pihak *tenant* sebesar Rp 173.907.975.813, sedangkan pendapatan tambahan sebesar Rp 44.324.941.362
2. Sehingga total pendapatan keseluruhan tahun 2016 sebesar RP 218.232.918.176.
3. Total biaya administrasi dan umum tahun 2016 sebesar Rp 164.727.234.163.
4. Pendapatan/biaya lain tahun 2016 sebesar Rp 29.698.292.334.
5. Sehingga Laba sebelum pajak tahun 2016 Rp 83.203.976.347.

Tabel 4.3.

Laporan Laba Rugi (Fiskal) PT. X Tahun 2016

| NO | U R A I A N | Laporan Keuangan Fiskal |
|----------|-------------------------------|-------------------------|
| A | PENDAPATAN USAHA | |
| | Pendapatan Utama. | |
| | Kompensasi Minimum | - |
| | Kompensasi Persentase | - |
| | Kompensasi Sekaligus | - |
| | Penggantian Asosiasi | - |
| | Kompensasi Lainnya | - |
| | TOTAL Pendapatan Utama | - |
| | Pendapatan Tambahan. | |
| | Assessment | - |
| | Air Limbah | 10.297.386.151 |

| | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|
| | Air Irigasi | 1.779.554.773 |
| | Pendapatan Conection Charge | 100.092.600 |
| | Pendapatan Lain-lain | 355.613.525 |
| | TOTAL Pendapatan Tambahan | 12.532.647.049 |
| | TOTAL PENDAPATAN | 12.532.647.049 |
| | | |
| B | BEBAN USAHA | |
| | Biaya Gaji Pegawai | 2.347.258.484 |
| | Biaya Alat Tulis | 56.772.096 |
| | Biaya Telekomunikasi | 35.966.184 |
| | Biaya Listrik | 125.006.847 |
| | Biaya Air | 2.232.901 |
| | Biaya Bahan Bakar dan Pelumas | 44.062.401 |
| | Biaya Rumah Tangga | 127.742.115 |
| | Biaya Perjalanan Dinas | 669.014.879 |
| | Biaya Konsultasi dan Pengawasan | 45.305.153 |
| | Biaya Rapat dan Jamuan Tamu | 50.090.032 |
| | Biaya Pemeliharaan Lapangan | 603.135.239 |
| | Biaya Pemeliharaan | 151.744.315 |
| | Biaya Promosi dan Penjualan | 340.028.220 |
| | Harga Pokok Tanah | 21.689.966 |
| | Biaya IBO | 19.022.975 |
| | Biaya Asuransi | 5.793.550 |
| | Biaya Sewa | 238.536.155 |
| | Biaya PBB | 106.850.413 |
| | Biaya laboratorium | 4.609.982 |
| | Biaya Kodal | 401.246.623 |
| | Biaya Jasa Produksi/Bonus | 430.708.867 |
| | Biaya PKBL | 0 |
| | Biaya Gaji dan biaya Direksi | 1.041.893.359 |
| | Penyusutan | 541.871.257 |
| | Amortisasi | 32.690.115 |
| | Biaya Pajak | -0 |
| | | |
| | Total Biaya Adm & Umum | 7.443.272.128 |
| | | |
| | PENDAPATAN/BIAYA LAIN | |
| | Pendapatan bunga Bank | - |

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| | Pendapatan Lainnya | (4.666.356.454) |
| | Penyisihan Kerugian Piutang | - |
| | Pendapatan Selisih Kurs | (86.064.436) |
| | Beban Non Operasional | 304.330.061 |
| | | |
| | Total Pendapatan/Biaya lainnya | (4.448.090.829) |
| | | - |
| | Laba Sebelum Pajak | 9.537.465.750 |

Sumber : Data sekunder PT.X, 2016

Terkait Laporan Laba Rugi Fiskal PT. X, penjelasan, sebagai berikut :

1. Pendapatan utama PT. X berasal dari usaha penyewaan tanah dan atau bangunan sehingga secara fiskal dikenakan PPh Final atau PPh Pasal 4 ayat (2). Maksud dari kompensasi minimum adalah pendapatan sewa sehubungan penyewaan lahan dan atau bangunan yang dibayarkan pertama kali oleh *tenant* kepada PT.X, sedangkan kompensasi persentase adalah pendapatan sehubungan sewa sehubungan kondisi *tenant* ketika beroperasi di wilayah PT. X mendapat atau memperoleh keuntungan, berdasarkan keuntungan yang dialami *tenant* dipotong sebesar persentase yang disepakati oleh pihak *tenant* dan PT. X, kompensasi sekaligus adalah kompensasi yang dibayarkan secara langsung selama beberapa tahun kepada PT.X. Adapun besaran pendapatan utama tahun fiskal 2016 sebesar Rp 0. Total pendapatan PT. X sebesar Rp 12.532.647.049 hal ini didapat dari pendapatan tambahan PT. X berupa jasa pengolahan air limbah, air irigasi, pendapatan *connection charge*, serta pendapatan lain-lain atau dalam fiskal disebut pendapatan tidak final.

2. Total biaya administrasi dan umum PT. X sebesar Rp 7.443.272.128
3. Pendapatan dan biaya lainnya sebesar Rp 4.448.090.829.
4. Laba sebelum pajak PT. X sebesar Rp 9.537.465.750
5. Sehingga pajak penghasilan PT. X sebesar Rp 2.384.366.250 ($25\% \times \text{Rp } 9.537.465.750$). Pengenaan tarif PPh Badan sebesar 25%, didasarkan omzet PT. X tahun sebelumnya telah melebihi Rp 50 M setahun.

Tabel 4.4.

Daftar Biaya (Komersial) PT. X Tahun 2016

| A | BIAYA | |
|----------|---------------------------------|----------------|
| | Biaya Gaji Pegawai | 47.222.994.054 |
| | Biaya Alat Tulis | 988.581.277 |
| | Biaya Telekomunikasi | 719.973.694 |
| | Biaya Listrik | 2.176.763.536 |
| | Biaya Air | 38.881.852 |
| | Biaya Bahan Bakar dan Pelumas | 767.265.395 |
| | Biaya Rumah Tangga | 2.963.797.614 |
| | Biaya Perjalanan Dinas | 11.675.162.386 |
| | Biaya Konsultasi dan Pengawasan | 788.905.628 |
| | Biaya Rapat dan Jamuan Tamu | 2.152.030.672 |
| | Biaya Pemeliharaan Lapangan | 10.502.487.037 |
| | Biaya Pemeliharaan | 2.642.347.182 |
| | Biaya Promosi dan Penjualan | 6.423.901.946 |
| | Harga Pokok Tanah | 377.690.728 |
| | Biaya IBO | 1.848.002.072 |
| | Biaya Asuransi | 100.883.984 |
| | Biaya Sewa | 4.188.361.891 |

| | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| | Biaya PBB | 1.860.602.738 |
| | Biaya laboratorium | 80.274.332 |
| | Biaya Kodal | 6.986.969.406 |
| | Biaya Jasa Produksi/Bonus | 7.499.999.999 |
| | Biaya PKBL | 979.366.044 |
| | Biaya Gaji dan biaya Direksi | 20.211.044.324 |
| | Penyusutan | 9.413.804.991 |
| | Amortisasi | 569.238.020 |
| | Biaya Pajak (PPh 4 ayat 2) | 21.547.903.361 |
| | | |
| | Total Biaya Adm & Umum | 164.727.234.163 |

Sumber : Data sekunder PT.X, 2016

4.2.3. Penerapan Perencanaan Pajak

Penerapan perencanaan pajak yang dapat peneliti sarankan untuk optimalisasi pajak penghasilan pada PT. X, melalui dua cara yaitu memanfaatkan celah peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008 serta PMK Nomor 104/PMK.010/2016. Untuk peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008, peneliti memanfaatkan kelemahan penjelasan, sehingga dapat mengubah biaya yang *non-deductible* menjadi *deductible*. Seperti pemberian natura atau kenikmatan, dalam aturan sifat natura atau kenikmatan adalah *non-deductible*, untuk mengubahnya menjadi *deductible* maka natura atau kenikmatan ini diberikan dalam bentuk uang atau dimasukkan dalam tunjangan sehingga merubah sifatnya menjadi *deductible*. Kemudian untuk perencanaan melalui PMK Nomor 104/PMK.010/2016 memanfaatkan fasilitas perpajakan yang dapat dinikmati PT. X, sehingga mengurangi pajak terutang.

4.2.3.1. Perencanaan Pajak melalui UU Nomor 36 Tahun 2008

Hal yang dilakukan dalam perencanaan pajak, memanfaatkan peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008, antara lain:

1. Terkait biaya gaji dan gaji pegawai lainnya, terdapat biaya PPh 21 karyawan (rincian dalam biaya gaji pegawai, data dirahasiakan). Dalam biaya PPh 21 dibayar perusahaan termasuk dalam kategori *non deductible*. Hal ini disebabkan PT. X menerapkan PPh 21 dengan *net method*. Sehingga biaya PPh 21 harus dikoreksi fiskal. Oleh sebab itu peneliti menyarankan biaya PPh 21 karyawan diubah menjadi tunjangan PPh Pasal 21 atau diubah menjadi *gross-up method* agar biaya PPh 21 karyawan menjadi *deductible* atau dapat diakui sebagai beban pajak. Hal ini sesuai dengan aturan Kep-545/PJ./2000 yang selanjutnya diubah dengan aturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016. Berikut peneliti lampirkan skema tunjangan PPh 21 karyawan :

Tabel 4.5.

Skema Tunjangan PPh 21 Karyawan

| No | Uraian | Pegawai |
|----|--|--------------------------------------|
| A | Jabatan Status Ber-NPWP <u>Penghasilan Bruto</u> | Staf TK/0 Ya (Dalam Rupiah) |
| 1 | Gaji Pokok | 10.000.000 |
| 2 | Tunjangan Jabatan | 100.000 |
| 3 | Tunjangan Makan | - |
| 4 | Tunjangan Transport | 100.000 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 5 | Tunjangan Pakaian | - |
| 6 | Uang Lembur | - |
| 7 | Tunjangan Pajak | 542.146 |
| 8 | Premi As. Kec Kerja - byr perush | 25.000 |
| 9 | Premi As. Kematian - byr perush | 25.000 |
| 10 | Tunjangan Kinerja | 800.000 |
| | sub total penghasilan teratur | 11.592.146 |
| 11 | Bonus | - |
| 12 | THR | - |
| | sub total penghasilan TDK teratur | - |
| | Total | 11.592.146 |
| | B. jabatan mana lb kecil - 5% X P Bruto | 579.607 |
| | - jml bl x 500.000 | 500.000 |
| B | <u>Pengurangan</u> | |
| 1a | Biaya Jabatan Pengh. Teratur | 500.000 |
| 1b | Biaya Jabatan Pengh. tdk teratur | - |
| 1 | Biaya Jabatan Pengh. Teratur dan tdk teratur | 500.000 |
| 2 | Iuran Pensiun (byr sendiri) | - |
| 3 | Iuran THT (byr sendiri) | 200.000 |
| | | 700.000 |
| C | Pengh Netto | 10.892.146 |
| D | Pengh Netto Masa Sebelumnya | - |
| E | Pengh Netto Setahun/disetahunkan | 130.705.750 |
| F | PTKP | 54.000.000 |
| G | Penghasilan Kena Pajak PPh 21 atas PKP | 76.705.000 |
| H | setahun/disetahunkan PPh pasal 21 dipot. masa | 6.505.750 |
| I | sebelumnya | - |
| J | PPh pasal 21 terutang | 6.505.750 |

| | | |
|---|--|---------|
| K | PPh pasal 21 terutang sebulan | 542.146 |
| L | PPh pasal 21 terutang sebulan (Non NPWP) | 542.146 |

Berikut tanggapan dari pihak manajemen dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede, *“terkait masalah tunjangan pajak ini, bagus sarannya. Kalau berdasarkan penjelasan adik, itu akan meningkatkan dari PPh 21 karyawan, yang akibatnya operasional naik. Bisa minta tolong dampaknya ke laporan laba rugi seperti apa, supaya kami dapat memikirkan ulang terkait perencanaan tersebut.”*

2. Masih dalam biaya gaji dan biaya gaji lainnya, untuk semakin mengoptimalkan pajak penghasilan PT. X. Terkait biaya pakaian kerja, sebaiknya diubah menjadi tunjangan pakaian kerja. Sebab sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat 1 a, yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan termasuk diantaranya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk diantaranya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus. Kemudian tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, hal ini dapat dilihat di Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Selain itu pemberian tunjangan oleh pemberi kerja merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan hal ini sesuai dengan aturan di Pasal 6 ayat 1 Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diantaranya adalah biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan

dalam bentuk uang. Dari peraturan tersebut dengan merubah pakaian kerja yang bersifat natura menjadi tunjangan pakaian kerja akan bersifat *taxable* dan *deductible*. Berikut peneliti lampirkan skema tunjangan pakaian kerja :

Tabel 4.6.

Skema Tunjangan Pakaian Kerja

| No | Uraian | Pegawai |
|----|--|-------------------|
| | Jabatan | Staf |
| | Status | TK/0 |
| | Ber-NPWP | Ya |
| A | <u>Penghasilan Bruto</u> | (Dalam Rupiah) |
| 1 | Gaji Pokok | 10.000.000 |
| 2 | Tunjangan Jabatan | 100.000 |
| 3 | Tunjangan Makan | - |
| 4 | Tunjangan Transport | 100.000 |
| 5 | Tunjangan Pakaian | 100.000 |
| 6 | Uang Lembur | - |
| 7 | Tunjangan Pajak | 559.796 |
| 8 | Premi As. Kec Kerja - byr perush | 25.000 |
| 9 | Premi As. Kematian - byr perush | 25.000 |
| 10 | Tunjangan Kinerja | 800.000 |
| | sub total penghasilan teratur | 11.709.796 |
| 11 | Bonus | - |
| 12 | THR | - |
| | sub total penghasilan TDK teratur | - |
| | Total | 11.709.796 |
| | B. jabatan mana lb kecil - 5% X P Bruto | 585.490 |
| | jml bl x 500.000 | 500.000 |
| B | <u>Pengurangan</u> | |

| | | |
|----|---|----------------|
| 1a | Biaya Jabatan Pengh. Teratur | 500.000 |
| 1b | Biaya Jabatan Pengh. tdk teratur | - |
| 1 | Biaya Jabatan Pengh. Teratur dan tdk teratur | 500.000 |
| 2 | Iuran Pensiun (byr sendiri) | - |
| 3 | Iuran THT (byr sendiri) | 200.000 |
| | | 700.000 |
| C | Pengh Netto | 11.009.796 |
| D | Pengh Netto Masa Sebelumnya | - |
| E | Pengh Netto Setahun/disetahunkan | 132.117.550 |
| F | PTKP | 54.000.000 |
| G | Penghasilan Kena Pajak PPh 21 atas PKP | 78.117.000 |
| H | setahun/disetahunkan PPh pasal 21 dipot. masa | 6.717.550 |
| I | sebelumnya | - |
| J | PPh pasal 21 terutang | 6.717.550 |
| K | PPh pasal 21 terutang sebulan | 559.796 |
| L | PPh pasal 21 terutang sebulan (Non NPWP) | 559.796 |

Tanggapan dari pihak manajemen dari Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede, sebagai berikut, *“sebenarnya terkait pakaian kami biasanya mengganti ngga setiap tahun, bisa 2 atau 3 tahun. Usulnya bagus, karena lumayan menghemat beban pajak kami. Kedepannya akan kami coba terapkan.”* Kemudian dari Staf Seksi Pajak – Pak Karta menyampaikan, *“tolong sekalian dibuat untuk skema perhitungannya seperti apa, supaya kami dapat mengetahui juga perhitungannya.”*

3. Kemudian dalam biaya rumah tangga terdapat biaya extra fooding dan sesajen. Agar biaya tersebut dapat diakui pajak atau *deductible*, peneliti menyarankan agar PT. X memanggil atau memperkerjakan pembuat sesajen. Dengan memperkerjakan pembuat sesajen maka akan dikenakan PPh Pasal 21 bukan pegawai atau dapat dibuat satu paket jasa ke orang pribadi dan dipotong PPh 21 bukan pegawai sehingga dapat dibiayakan.

Adapun tanggapan dari pihak manajemen, dari Staf Seksi Pajak – Pak Diatmika, sebagai berikut, *“jujur ini bagus, soalnya baru saya pernah dengar, coba nanti kamu rapatkan dulu, apakah nanti masuk ke tenaga kontrak atau tidak, tapi saat ini kami rasa tidak perlu sebab uangnya telah dianggarkan sedemikian rupa.”*

4. Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai yang berkaitan dengan tugas suatu lembaga atau perusahaan berhubungan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Secara umum biaya perjalanan dinas, dapat dibagi menjadi tiga komponen, antara lain, biaya transportasi, biaya akomodasi, serta uang saku. Ruang lingkup biaya fiskal atau *deductible* sesuai dalam aturan Pasal 6 ayat 1 UU PPh menyatakan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, serta biaya perjalanan dinas. Jika dilihat sekilas dari aturan perpajakan di atas, pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dikategorikan sebagai objek pajak jika memenuhi unsur adanya tambahan kemampuan ekonomis bagi Wajib Pajak atau pegawai. Akan tetapi jika perusahaan dapat membuktikan bahwa tidak ada kelebihan uang yang membuatnya menjadi kemampuan ekonomis bagi pegawai, maka tidak ada objek PPh 21. Oleh sebab itulah bukti-bukti pengeluaran sangat penting untuk setiap komponen biaya perjalanan dinas. Ada beberapa cara untuk

mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas, antara lain pemberian uang perjalanan dengan cara lumpsum dan penggantian biaya atau *reimbursement*. Dalam cara lumpsum, pegawai pulang dari perjalanan dinas dapat membuat rincian biaya yang telah dikeluarkan secara wajar dan mengembalikan uang sisanya. Sedangkan dengan metode *reimbursement*, setiap pegawai yang pulang dari perjalanan dinas dapat membuat perincian biaya yang telah dikeluarkannya secara wajar dan perusahaan memberikan penggantian biaya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diperkirakan bahwa setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak akan kelebihan uang yang membuatnya mempunyai kemampuan ekonomis, sehingga bukanlah objek PPh Pasal 21 bagi karyawan yang menerimanya. Terhadap biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan sebagai *deductible*, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU PPh. Sedangkan untuk komponen uang saku, selain dibuktikan dengan adanya bukti pengeluaran, perusahaan sebelumnya telah menghitung secara detail dan wajar atau perusahaan memiliki standar semua pengeluaran yang akan dijadikan komponen uang saku tersebut, sehingga uang saku tersebut dianggap habis saat pegawai melakukan perjalanan dinas. Permasalahan di PT. X, adalah daftar nominatif dan bukti perjalanan dinas tidak lengkap dan jelas. Oleh sebab itu peneliti menyarankan untuk membuat daftar nominatif disertai bukti yang lengkap dan jelas. Berikut peneliti lampirkan pula daftar nominatif terkait biaya perjalanan dinas di bawah ini :

Gambar 4.1.

Daftar Nominatif Biaya Perjalanan Dinas

KEMENTERIAN
SATKER :

DAFTAR NOMINATIF / RINCIAN PERJALANAN DINAS

| No | Nama / NIP | Gol. | Tujuan | Tanggal Berangkat | Lama (Hari) | Biaya | | | Jumlah | No. Rekening |
|--------|------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | Transpor | Uang Harian | Penginapan | | |
| 1 | Muhammad / 060012345 | III/a | Semarang | 10 Januari 2010 | 5 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 4.700.000 | |
| 2 | Muslim 198501012000081001 | II/c | Jakarta | 15 Januari 2010 | 3 | 1.550.500 | 1.350.000 | 480.000 | 3.380.500 | |
| 3 | Ahmad / 060123456 | II/a | Pekanbaru | 15 Januari 2010 | 3 | 180.000 | 900.000 | 400.000 | 1.480.000 | |
| Jumlah | | | | | | 3.730.500 | 3.750.000 | 2.080.000 | 9.560.500 | |

Dumai, 20 Januari 2010
Kuasa Pengguna Anggaran

Abdurrahman, SE, ME
NIP. 197001011990031001

Sumber : Docslide

Tanggapan dari pihak manajemen, dari Staf Seksi Pajak – Pak Karta, sebagai berikut, ”iya kami menyadari bahwa disini (biaya perjalanan dinas) banyak yang tidak dapat diakui sehubungan dengan daftar nominatif yang kurang lengkap. Hal ini disebabkan staf di Mandalika masih baru sehingga perlu penyesuaian. Terimakasih sarannya dan contoh daftar nominatifnya, sehingga kami harapkan yang di sana (Mandalika) ada pegangan atau role modelnya. Kemudian terkait dengan penerapan perjalanan dinas kami seperti diungkapkan Pak Diatmika, kadang menggunakan metode reimbursement, kadang metode lumpsum tergantung keadaan.”

5. Terkait dengan biaya rapat dalam biaya rapat dan jamuan tamu, berdasarkan rincian pengeluaran banyak tidak memiliki daftar nominatif atau rinciannya kurang jelas, sehingga tidak dapat diakui sebagai beban pajak. Oleh sebab itu peneliti menyarankan agar PT. X membuat daftar nominatif yang baik dan jelas sehingga biaya menjadi *deductible*. Namun dapat juga memanfaatkan fasilitas *full board* hotel. Maksudnya *full board* ini adalah memanfaatkan fasilitas penginapan, ruang pertemuan, hingga jamuan

makan di hotel tersebut. Sehingga biaya *full board* akan terkategori sebagai PPh Pasal 23 sehubungan pemberian jasa oleh pihak hotel kepada perusahaan, dan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan sehingga dapat dikreditkan serta bersifat *deductible*, dan apabila hotel tidak mau dipotong PPh Pasal 23 sehubungan jasa *full board* tersebut, maka agar tetap dapat dikreditkan perusahaan dapat merubahnya menjadi *gross up*. Berikut gambaran *gross up* terkait PPh Pasal 23, sebagai berikut. Misal PT. A melakukan kegiatan *entertainment* di Hotel B sebesar Rp 10.000.000. Atas transaksi tersebut dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. A, namun Hotel B menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 tersebut. Sehingga PT. A yang harus menanggung PPh Pasal 23 tersebut, agar PPh Pasal 23 tersebut dapat dikreditkan PT. A menggunakan metode *gross up*. Berikut perhitungannya : DPP sebesar Rp 10.000.000, PPh Pasal 23 dipotong sebesar Rp 204.082 $((100/98 \times \text{Rp } 10.000.000) - \text{Rp } 10.000.000)$. Maka dengan menggunakan metode *gross up*, jurnal masing-masing perusahaan sebagai berikut :

Hotel B (Penerima penghasilan) :

| | | | |
|-----|-----------------|---------------|---------------|
| Kas | | Rp 10.000.000 | |
| | Pendapatan Sewa | | Rp 10.000.000 |

PT. A (Pemberi penghasilan) :

| | | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------|
| Beban Sewa | | Rp 10.204.082 | |
| | Hutang PPh Pasal 23 | | Rp 204.082 |
| | Kas | | Rp 10.000.000 |

Terkait dengan biaya "*entertainment*" dan sejenisnya, daftar nominatif biaya rapat atau *entertainment* yang diperkenankan menurut aturan Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 27/PJ.22/1986, sebagai berikut

:

Gambar 4.2.

Daftar Nominatif Biaya Rapat atau Entertainment

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA

TAHUN PAJAK :

| Nomor | Pemberian entertainment dan sejenisnya | | | | | Realisasi usaha yg diberikan entertainment dan sejenisnya | | | | Keterangan |
|-------|--|--------|--------|-------|-------------|---|--------|-----------------|-------------|------------|
| | Tanggal | Tempat | Alamat | Jenis | Jumlah (Rp) | Nama | Posisi | Nama Perusahaan | Jenis Usaha | |
| | | | | | | | | | | |

Sumber : Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor

SE – 27/PJ.22/1986

Tanggapan pihak manajemen dalam hal ini dari Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede, sebagai berikut,” *Iya terima kasih sarannya. Terimakasih atas contoh daftar nominatif yang diberikan. Baik bisa dilanjutkan.*”

- Biaya promosi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, menjelaskan bahwa biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah biaya periklanan di media elektronik, media cetak dan atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan atau biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk. Biaya promosi tersebut dapat diakui apabila memiliki daftar nominatif yang lengkap dan jelas, serta biaya

promosi tersebut tergolong biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3 M) penghasilan. Kelemahan dari PT. X terkait biaya promosi tersebut rinciannya tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga biaya tersebut tidak dapat mengurangi pajak atau bersifat *non-deductible*. Oleh sebab itu peneliti menyarankan agar PT. X membuat rincian daftar nominatif disertai bukti pendukung yang lengkap serta jelas. Agar biaya promosi dalam hal ini biaya pameran pariwisata, biaya iklan, brosur, dan buku, biaya promosi lain-lain, serta biaya *re-branding* dapat bersifat *deductible* sehingga mengurangi pajak terhutang PT. X. Berikut peneliti lampirkan pula daftar nominatif sesuai dengan peraturan PMK Nomor 02/PMK.03/2010.

Gambar 4.3.

Daftar Nominatif Biaya Promosi

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
 Tahun Pajak :

| No | Data Penerima | | | | | | | Pemotongan PPh | |
|----|---------------|------|--------|---------|------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------|
| | Nama | NPWP | Alamat | Tanggal | Bentuk dan Jenis Biaya | Jumlah (Rp) | Keterangan | Jumlah PPh | Nomor Bukti Potong |
| | | | | | | | | | |

.....

Nama Wajib Pajak

Sumber : PMK Nomor 02/PMK.03/2010

Tanggapan pihak manajemen, dari Staf Seksi Pajak – Pak Karta yaitu, ”jadi sama ya seperti diatas (perjalanan dinas). Kami berterimakasih atas sarannya.”

7. Dalam biaya gaji dan biaya direksi, terdapat biaya PPh gaji atau PPh 21 (rincian dalam biaya gaji dan biaya direksi, data dirahasiakan). Dalam biaya PPh 21 dibayar perusahaan termasuk dalam kategori *non deductible*. Hal ini disebabkan PT. X menerapkan PPh 21 dengan *net method*. Sehingga biaya PPh 21 harus dikoreksi fiskal. Oleh sebab itu peneliti menyarankan biaya PPh 21 karyawan diubah menjadi tunjangan PPh Pasal 21 atau diubah menjadi *gross-up method* agar biaya PPh 21 karyawan menjadi *deductible* atau dapat diakui sebagai beban pajak sekaligus *taxable*. Hal ini sesuai dengan aturan Kep-545/PJ./2000 yang selanjutnya diubah dengan aturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016. Terkait skema sesuai dengan skema tunjangan PPh 21 diatas.

Adapun tanggapan dari pihak manajemen, dari Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede, sebagai berikut,”*ya sama seperti diatas, coba adik buat dampakanya ke laporan laba rugi yang komersial seperti apa. Supaya kami tahu dampakanya dari penerapan pajak ini, biar ada gambaran bagaimana dampakanya takutnya komersial kami turunnya drastis.*” Kemudian tanggapan dari Staf Seksi Pajak – Pak Karta, menyampaikan sebagai. *Jadi sama seperti bapak Gede, dibuat saja seperti apa proyeksi dari laba ruginya serta estimasi dari peningkatan gajinya.*”

8. Pada biaya gaji dan biaya direksi terdapat pula biaya pakaian kerja, untuk semakin mengoptimalkan pajak penghasilan PT. X. Terkait biaya pakaian kerja, sebaiknya diubah menjadi tunjangan pakaian kerja. Sebab sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat 1 a, yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan termasuk diantaranya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk diantaranya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus. Kemudian tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan kepada para

pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, hal ini dapat dilihat di Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Selain itu pemberian tunjangan oleh pemberi kerja merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan hal ini sesuai dengan aturan di Pasal 6 ayat 1 Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diantaranya adalah biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dari peraturan tersebut dengan merubah pakaian kerja yang bersifat natura menjadi tunjangan pakaian kerja akan bersifat *taxable* dan *deductible*. Terkait skema pakaian kerja sesuai dengan skema pakaian kerja karyawan diatas.

Berikut tanggapan dari pihak manajemen, dalam hal ini dari Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede, ”*siap kami terapkan jadi akan kami coba untuk kedepannya.*”

9. Bagian biaya gaji dan biaya direksi, yaitu biaya PPh 21 Honor Dekom (rincian dalam biaya gaji dan biaya direksi, data dirahasiakan) dapat dimasukkan dalam *deductible*. Untuk memasukkan dalam *deductible* PT. X perlu merubah PPh 21 Honor Dekom menjadi Tunjangan PPh 21 Honor Dekom. Perubahan tersebut menyebabkan PT. X merubah metode perhitungan PPh 21 menjadi *gross up method* agar biaya menjadi *deductible* dan *taxable*. Hal ini sesuai dengan aturan Kep-545/PJ./2000 yang

selanjutnya diubah dengan aturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016. Terkait skemanya sesuai dengan skema tunjangan PPh 21 karyawan diatas.

Adapun tanggapan dari pihak manajemen, dalam hal ini dari Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede sebagai serikut, *”iya, mohon dibuatkan terkait dampaknya di laba rugi perusahaan seperti apa. Supaya kami ada gambaran juga. Suksma.”*

10. Dalam beban non operasional terdapat biaya lain-lain. Dalam biaya lain-lain tersebut banyak item biaya yang dapat mengurangi pajak terhutang, sehingga optimalisasi pajak penghasilan dapat tercapai. Adapun item biaya yang terdapat dalam biaya lain-lain, seperti biaya promosi, biaya perjalanan dinas, biaya rapat atau biaya *“entertainment”*, biaya sanksi administrasi pajak, dan lain-lain. Terkait biaya promosi, promosi dapat bersifat *deductible* apabila tergolong biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3 M) serta daftar nominatifnya lengkap dan jelas. Begitu pula dalam hal rapat serta biaya perjalanan dinas dapat *deductible* jika daftar nominatif jelas, lengkap serta bukti pendukungnya lengkap dan sah. Kemudian adanya sanksi administrasi dan denda pajak yang dibayarkan PT. X, untuk menghindari kembali hal tersebut perlu dibuatkan *standard operational procedure* (SOP) terkait batas akhir pelaporan hingga pembayaran di PT. X, misalnya batas akhir pembayaran pajak menurut aturan setiap tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian pelaporan PPh masa tanggal 20 bulan berikutnya. Maka di SOP dapat diatur tanggal pelaporan dan pembayaran di PT. X satu hari sebelumnya atau tepat di tanggal akhir sesuai ditetapkan oleh aturan. Sebab salah satu upaya untuk optimalisasi PPh

adalah administrasi pajak dalam hal ini pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

Adapun tanggapan dari pihak manajemen, dalam hal ini dari Staf Seksi Pajak – Pak Karta, sebagai berikut, *”terkait biaya promosi, perjalanan dinas dan entertainment kami setuju dengan adik. Kemudian terkait dengan denda, kami sebenarnya sudah ada prosedurnya Cuma kadang ada sedikit kendala dengan pihak diluar seperti dalam hal PPN terkait faktur kami sudah mengingatkan kadang belum dikirimkan juga. Nah begitulah situasi di lapangan, kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi terimakasih atas sarannya.”*

11. Terkait dengan beban sesajen dalam beban non operasional. Agar biaya tersebut dapat diakui untuk mengurangi pajak atau bersifat *deductible*. Maka peneliti menyarankan agar perencanaan pajaknya, dibuat satu paket jasa (dalam hal ini dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi) ke orang pribadi dan dipotong PPh 21 sehingga dapat dibiayakan.

Adapun tanggapan pihak manajemen, dalam hal ini dari Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede *”iya idenya bagus, kami pertimbangkan dan diskusikan dulu dengan yang lain, apakah mau dimasukkan ke kontrak atau tidak. Tapi sejauh ini sesuai dengan penjelasan Pak Karta tadi memang anggarannya sudah dialokasikan setiap tahun jadi tidak masalah.”*

4.2.3.2. Perencanaan Pajak melalui PMK Nomor 104/PMK.010/2016

PT. X merupakan perusahaan yang beroperasi dalam wilayah KEK. Dalam KEK terdapat berbagai fasilitas perpajakan, seperti fasilitas pengurangan PPh badan, fasilitas PPh, fasilitas PPN dan PPnBM, serta fasilitas cukai. Terkait pemanfaatan fasilitas di kawasan KEK, merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak. Adapun perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT. X, antara lain:

1. Dalam fasilitas pajak penghasilan, fasilitas yang dapat dimanfaatkan PT. X adalah fasilitas pengurangan penghasilan neto. Fasilitas pengurangan penghasilan neto yang diberikan di wilayah KEK sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi/beroperasi secara komersial. Adapun aktiva yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah aktiva yang digunakan dalam proses produksi cakupan produk yang tercantum dalam izin prinsip penanaman modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada termasuk aktiva penunjang utama yang terkait langsung dengan proses produksi dimaksud. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, syaratnya, adalah, Wajib Pajak badan dalam negeri yang berkedudukan di KEK yang melakukan Penanaman Modal baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada, 1) bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan, 2) bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK. Dalam persyaratan ini PT. X, memenuhi sebagai bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan. Fasilitas pengurangan PPh badan tidak dapat dimanfaatkan PT. X sebab PT. X tidak memenuhi syarat terkait masa pendirian badan, dan definisi jasa yang tidak diatur dalam peraturan KEK. Kemudian untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto,

maka wajib membuat permohonan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK serta pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi atau beroperasi secara komersial. Dimana dalam surat permohonan tersebut, dilampiri dengan dokumen berupa :

- a. Fotokopi surat permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan bukti tanda terima surat permohonan Wajib Pajak dimaksud.
 - b. Izin prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK.
 - c. Rincian aktiva tetap beserta *layout* penempatan aktiva.
 - d. Surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan Lainnya di KEK atau bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan Utama di KEK dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
 - e. Surat keterangan dari Adminisrator KEK bahwa Wajib Pajak belum berproduksi atau beroperasi secara komersial.
 - f. Berita acara hasil pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Kemudian fasilitas pajak penghasilan yang dapat dimanfaatkan PT. X juga adalah fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Fasilitas ini atas aktiva tetap berwujud dan aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha yang digunakan untuk

kegiatan pokok. Adapun aktiva yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah aktiva yang digunakan dalam proses produksi cakupan produk yang tercantum dalam izin prinsip penanaman modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada termasuk aktiva penunjang utama yang terkait langsung dengan proses produksi dimaksud. Syarat untuk memanfaatkan fasilitas ini sama dengan fasilitas pengurangan penghasilan neto. Selain persyaratan tersebut juga ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kelompok aktiva tetap berwujud dan kelompok aktiva tak berwujud adalah sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah :
 - a. Harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus.
 - b. Nilai sisa buku aktiva bagi wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.
- c. Tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan tarif amortisasi yang dipercepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai satu bulan penuh

- e. Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva tetap baru adalah harga perolehan aktiva baru dimaksud.

Kemudian mengajukan permohonan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK serta pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi atau beroperasi secara komersial. Dalam surat permohonan tersebut dilaampirkan pula dokumen pendukung seperti halnya dokumen pendukung fasilitas pengurangan penghasilan neto.

Terkait dengan perencanaan pajak yang diusulkan diatas, tanggapan manajemen, dalam hal ini dari Kepala Bagian Keuangan – Pak Gede, sebagai berikut, *”ini sudah peraturan terbaru ya?, soalnya saya dengar akan ada peraturan terbaru yang akan diterbitkan Kalau gak salah PP berapa nonya, tolong dicek ya.. Tapi terimakasih sarannya, jika adik ada informasi terbaru terkait aturan ini (aturan pajak di KEK dimasukkan saja sarannya supaya jadi bahan persiapan buat kami disini untuk memanfaatkan fasilitas,”*

4.2.4. Biaya Yang Diakui Dalam Perencanaan Perpajakan

Tabel 4.7.

Beban Dengan Perencanaan Pajak Tahun 2016

| | BEBAN USAHA | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Biaya Gaji Pegawai | 2.584.097.634 |
| | Biaya Alat Tulis | 56.772.096 |
| | Biaya Telekomunikasi | 35.966.184 |
| | Biaya Listrik | 125.006.847 |
| | Biaya Air | 2.232.901 |
| | Biaya Bahan Bakar dan Pelumas | 44.062.401 |
| | Biaya Rumah Tangga | 136.400.060 |
| | Biaya Perjalanan Dinas | 670.479.461 |
| | Biaya Konsultasi dan Pengawasan | 45.305.153 |

| | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| | Biaya Rapat dan Jamuan Tamu | 71.118.748 |
| | Biaya Pemeliharaan Lapangan | 603.135.239 |
| | Biaya Pemeliharaan | 151.744.315 |
| | Biaya Promosi dan Penjualan | 351.006.470 |
| | Harga Pokok Tanah | 21.689.966 |
| | Biaya IBO | 19.022.975 |
| | Biaya Asuransi | 5.793.550 |
| | Biaya Sewa | 238.536.155 |
| | Biaya PBB | 106.850.413 |
| | Biaya laboratorium | 4.609.982 |
| | Biaya Kodal | 401.246.623 |
| | Biaya Jasa Produksi/Bonus | 430.708.867 |
| | Biaya Gaji dan biaya Direksi | 1.160.270.460 |
| | Penyusutan | 541.871.257 |
| | Amortisasi | 32.690.115 |
| | | |
| | Total Biaya Adm & Umum | 7.840.620.171 |

Sumber : Data yang diolah

Dalam biaya yang diakui perpajakan setelah menerapkan perencanaan pajak terdapat beberapa perubahan. Adapun perubahan tersebut terdapat dalam biaya gaji pegawai sebagai akibat adanya perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan pakaian kerja, biaya rumah tangga karena perencanaan pajak pada biaya extra fooding dan sesajen, biaya perjalanan dinas karena adanya perencanaan pajak biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat sebagai akibat perencanaan pajak dalam biaya rapat, biaya promosi dan penjualan adanya koreksi dikarenakan biaya pameran pariwisata, iklan, serta *rebranding*, kemudian biaya gaji dan biaya direksi, dikarenakan koreksi pada biaya tunjangan pajak, pakaian kerja, serta PPh 21 Dekom.

4.2.5. Laporan Laba Rugi Dengan Perencanaan Pajak

Laporan Laba Rugi dilakukan dengan cara total pendapatan dikurangi dengan biaya administrasi & umum ditambah dengan total pendapatan/biaya lainnya. Kemudian untuk menghitung laporan fiskal PT. X, maka dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal PT. X terdiri dari beda tetap / waktu serta beda proporsional. Beda proporsional muncul disebabkan PT. X menggunakan *joint cost* di dalam perpajakannya dimana beban yang mengurangi pajak dialokasikan sehingga tidak semua beban dapat mengurangi pajak. Berikut tabel selengkapnya terkait laba rugi PT. X dengan perencanaan pajak.

Tabel 4.8.

Laporan Laba Rugi (Fiskal) Dengan Perencanaan Pajak PT. X Tahun 2016

| NO | U R A I A N | Laporan Keuangan Komersial | Rekonsiliasi Fiskal | | | | Laporan Keuangan Fiskal |
|----|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | | | Positif | | Negatif | | |
| | | | Beda Tetap/Waktu | Proporsional | Beda Tetap/Waktu | Proporsional | |
| A | PENDAPATAN USAHA | | | | | | |
| | Pendapatan Utama. | | | | | | |
| | Kompensasi Minimum | 11.198.962.174 | - | - | 11.198.962.174 | - | - |
| | Kompensasi Persentase | 154.292.739.953 | - | - | 154.292.739.953 | - | - |
| | Kompensasi Sekaligus | 4.324.755.593 | - | - | 4.324.755.593 | - | - |
| | Penggantian Asosiasi | - | - | - | - | - | - |
| | Kompensasi Lainnya | 4.091.519.093 | - | - | 4.091.519.093 | - | - |
| | TOTAL Pendapatan Utama | 173.907.976.813 | - | - | - | - | - |
| | Pendapatan Tambahan. | | - | - | - | - | - |
| | Assessment | 22.301.814.313 | - | - | 22.301.814.313 | - | - |
| | Air Limbah | 10.297.386.151 | - | - | - | - | 10.297.386.151 |
| | Air Irigasi | 1.779.554.773 | - | - | - | - | 1.779.554.773 |
| | Pendapatan Conection Charge | 100.092.600 | - | - | - | - | 100.092.600 |
| | Pendapatan Lain-lain | 9.846.093.525 | - | - | 9.490.480.000 | - | 355.613.525 |
| | TOTAL Pendapatan Tambahan | 44.324.941.362 | - | - | - | - | 12.532.647.049 |
| | TOTAL PENDAPATAN | 218.232.918.176 | - | - | - | - | 12.532.647.049 |
| | | | - | - | - | - | |
| B | BEBAN USAHA | | | | | | |
| | Biaya Gaji Pegawai | 52.509.310.396 | 2.271.180.601 | 47.353.062.068 | - | - | 2.885.067.727 |
| | Biaya Alat Tulis | 988.581.277 | - | 931.809.181 | - | - | 56.772.096 |
| | Biaya Telekomunikasi | 719.973.694 | 93.688.983 | 590.318.527 | - | - | 35.966.184 |
| | Biaya Listrik | 2.176.763.536 | - | 2.051.756.689 | - | - | 125.006.847 |
| | Biaya Air | 38.881.852 | - | 36.648.951 | - | - | 2.232.901 |
| | Biaya Bahan Bakar dan Pelumas | 767.265.395 | - | 723.202.994 | - | - | 44.062.401 |
| | Biaya Rumah Tangga | 2.963.797.614 | 588.642.303 | 2.238.755.251 | - | - | 136.400.060 |
| | Biaya Perjalanan Dinas | 11.675.162.386 | - | 11.004.682.925 | - | - | 670.479.461 |
| | Biaya Konsultasi dan Pengawasan | 788.905.628 | - | 743.600.475 | - | - | 45.305.153 |
| | Biaya Rapat dan Jamuan Tamu | 2.152.030.672 | 913.628.927 | 1.167.282.997 | - | - | 71.118.748 |
| | Biaya Pemeliharaan Lapangan | 10.502.487.037 | - | 9.899.351.798 | - | - | 603.135.239 |
| | Biaya Pemeliharaan | 2.642.347.182 | - | 2.490.602.867 | - | - | 151.744.315 |
| | Biaya Promosi dan Penjualan | 6.423.901.946 | 331.312.081 | 5.761.123.395 | 19.540.000 | - | 351.006.470 |
| | Harga Pokok Tanah | 377.690.728 | - | 356.000.762 | - | - | 21.689.966 |
| | Biaya IBO | 1.848.002.072 | 1.516.752.072 | 312.227.025 | - | - | 19.022.975 |
| | Biaya Asuransi | 100.883.984 | - | 95.090.434 | - | - | 5.793.550 |
| | Biaya Sewa | 4.188.361.891 | 34.695.000 | 3.915.130.736 | - | - | 238.536.155 |
| | Biaya PBB | 1.860.602.738 | - | 1.753.752.325 | - | - | 106.850.413 |
| | Biaya laboratorium | 80.274.332 | - | 75.664.350 | - | - | 4.609.982 |
| | Biaya Kodak | 6.986.969.406 | - | 6.585.722.783 | - | - | 401.246.623 |
| | Biaya Jasa Produksi/Bonus | 7.499.999.999 | - | 7.069.291.132 | - | - | 430.708.867 |
| | Biaya PKBL | 979.366.044 | 979.366.044 | - | - | - | 0 |
| | Biaya Gaji dan biaya Direksi | 20.634.881.827 | 7.075.651 | 19.443.195.640 | - | - | 1.184.610.536 |
| | Penyusutan | 9.413.804.991 | 204.713.328 | 8.893.816.613 | 226.596.208 | - | 541.871.257 |
| | Amortisasi | 569.238.020 | - | 536.547.905 | - | - | 32.690.115 |
| | Biaya Pajak | 21.547.903.361 | 21.547.903.361 | (0) | - | - | -0 |
| | | | - | - | - | - | |
| | Total Biaya Adm & Umum | 164.727.234.163 | - | - | - | - | 8.165.930.340 |
| | | | - | - | - | - | |
| | PENDAPATAN/BIAYA LAIN | | - | - | - | - | |
| | Pendapatan bunga Bank | (36.485.590.187) | - | - | 36.485.590.187 | - | - |
| | Pendapatan Lainnya | (9.666.356.454) | - | - | 5.000.000.000 | - | (4.666.356.454) |
| | Penyisihan Kerugian Piutang | 4.354.540.000 | 4.354.540.000 | - | - | - | - |
| | Pendapatan Selisih Kurs | (86.064.436) | - | - | - | - | (86.064.436) |
| | Beban Non Operasional | 12.185.178.742 | 6.347.909.922 | 5.685.974.199 | - | - | 346.427.875 |
| | | | - | - | - | - | |
| | Total Pendapatan/Biaya lainnya | (29.459.259.082) | - | - | - | - | (4.405.993.015) |
| | | | - | - | - | - | |
| | Laba Sebelum Pajak | 77.254.748.248 | - | - | - | - | 8.772.709.724 |
| | | | - | - | - | - | 8.772.709.724 |
| | | | - | - | - | - | |
| D | PAJAK PENGHASILAN | | | | | | 2.193.177.431 |

Sumber : Data yang diolah

Penjelasan dari Laporan Laba Rugi (Fiskal) PT. X tahun 2016, sebagai berikut:

1. Total pendapatan PT. X sebesar Rp 12.532.647.049 terdiri dari pendepatan utama sebesar Rp 0 serta pendapatan tambahan Rp 12.532.647.049. Pendapatan utama dikoreksi sebab pendapatan utama PT. X adalah menyewakan lahan kepada pihak investor atau *tenant*, dimana menyewakan

lahan atau tanah atau bangunan termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final.

2. Terkait dengan penerapan *joint cost*, beban yang diakui secara pajak atau *deductible* tidak dapat diakui secara keseluruhan atau diakui sebesar persentase yang dialokasikan. Untuk menghitung berapa persentase yang dapat diakui rumusnya adalah total pendapatan final dibagi total pendapatan keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut didapatkan persentase beban yang dapat diakui pajak sebesar 94,26% (Rp 205.700.271.126 / Rp 218.232.918.176) atau sebesar 5,74% (Rp 12.532.647.049 / Rp 218.232.918.176).
3. Total biaya administrasi dan umum dikoreksi menjadi Rp 8.165.930.340. Total biaya usaha dikurangi dengan beda tetap dari peneliti berdasarkan perencanaan pajak yang diusulkan sebelumnya.
4. Beban Non Operasional berubah menjadi Rp 346.427.875.
5. Pendapatan dan biaya lainnya sebesar Rp 4.405.993.015.
6. Sehingga laba sebelum pajak sebesar Rp 8.772.709.724.
7. Perhitungan pajak penghasilan menjadi Rp 2.193.177.431 ($25\% \times \text{Rp } 8.772.709.724$).

Sedangkan dari sisi Laporan Laba Rugi (Komersial), dengan perencanaan pajak yang peneliti lakukan, terjadi penurunan laba sebelum pajak PT. X sebesar Rp 5.949.228.099 (Rp 83.203.976347 – Rp 77.254.748.248). Hal ini disebabkan perubahan penghitungan PPh Pasal 21 dari *net method* menjadi *gross up method*. Dengan perubahan tersebut biaya gaji meningkat sehingga beban operasional PT.

X meningkat yang berakibat kepada laba sebelum pajak yang menurun dari sebelum perencanaan pajak. Berikut terlampir Laporan Laba Rugi (Komersial) tahun 2016 :

Tabel 4.9.

**Laporan Laba Rugi (Komersial) Dengan Perencanaan Pajak PT. X Tahun
2016**

| NO | U R A I A N | Laporan Keuangan Komersial |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| A | PENDAPATAN USAHA | |
| | Pendapatan Utama. | |
| | Kompensasi Minimum | 11.198.962.174 |
| | Kompensasi Persentase | 154.292.739.953 |
| | Kompensasi Sekaligus | 4.324.755.593 |
| | Penggantian Asosiasi | - |
| | Kompensasi Lainnya | 4.091.519.093 |
| | TOTAL Pendapatan Utama | 173.907.976.813 |
| | Pendapatan Tambahan. | |
| | Assessment | 22.301.814.313 |
| | Air Limbah | 10.297.386.151 |
| | Air Irigasi | 1.779.554.773 |
| | Pendapatan Conection Charge | 100.092.600 |
| | Pendapatan Lain-lain | 9.846.093.525 |
| | TOTAL Pendapatan Tambahan | 44.324.941.362 |
| | TOTAL PENDAPATAN | 218.232.918.176 |
| | | |
| B | BEBAN USAHA | |
| | Biaya Gaji Pegawai | 52.509.310.396 |
| | Biaya Alat Tulis | 988.581.277 |
| | Biaya Telekomunikasi | 719.973.694 |
| | Biaya Listrik | 2.176.763.536 |
| | Biaya Air | 38.881.852 |
| | Biaya Bahan Bakar dan Pelumas | 767.265.395 |
| | Biaya Rumah Tangga | 2.963.797.614 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | Biaya Perjalanan Dinas | 11.675.162.386 |
| | Biaya Konsultasi dan Pengawasan | 788.905.628 |
| | Biaya Rapat dan Jamuan Tamu | 2.152.030.672 |
| | Biaya Pemeliharaan Lapangan | 10.502.487.037 |
| | Biaya Pemeliharaan | 2.642.347.182 |
| | Biaya Promosi dan Penjualan | 6.423.901.946 |
| | Harga Pokok Tanah | 377.690.728 |
| | Biaya IBO | 1.848.002.072 |
| | Biaya Asuransi | 100.883.984 |
| | Biaya Sewa | 4.188.361.891 |
| | Biaya PBB | 1.860.602.738 |
| | Biaya laboratorium | 80.274.332 |
| | Biaya Kodal | 6.986.969.406 |
| | Biaya Jasa Produksi/Bonus | 7.499.999.999 |
| | Biaya PKBL | 979.366.044 |
| | Biaya Gaji dan biaya Direksi | 20.634.881.827 |
| | Penyusutan | 9.413.804.991 |
| | Amortisasi | 569.238.020 |
| | Biaya Pajak | 21.547.903.361 |
| | | |
| | Total Biaya Adm & Umum | 164.727.234.163 |
| | | |
| | PENDAPATAN/BIAYA LAIN | |
| | Pendapatan bunga Bank | (36.485.590.187) |
| | Pendapatan Lainnya | (9.666.356.454) |
| | Penyisihan Kerugian Piutang | 4.354.540.000 |
| | Pendapatan Selisih Kurs | (86.064.436) |
| | Beban Non Operasional | 12.185.178.742 |
| | | |
| | Total Pendapatan/Biaya lainnya | (29.459.259.082) |
| | | |
| | Laba Sebelum Pajak | 77.254.748.248 |

Sumber : Data yang diolah

4.2.6. Pajak Yang Dibayar Dengan Perencanaan Pajak

Tabel 4.10.

Penghematan Pajak

| Pajak yang dibayar | 2016 |
|---------------------------|---------------|
| Sebelum Perencanaan Pajak | 2.384.366.250 |
| Sesudah Perencanaan Pajak | 2.193.177.431 |
| Penghematan Pajak | 191.189.006 |

Sumber : Data yang diolah

Dengan penerapan perencanaan pajak terjadi penghematan pajak sebesar Rp 191.189.006. Dengan terjadinya penghematan pajak, maka penerapan perencanaan pajak pada perusahaan dinyatakan berhasil. Agar perencanaan pajak semakin optimal, administrasi pajak di PT. X terkait pembayaran dan pelaporan pajak juga harus ditingkatkan guna menghindari sanksi administrasi pajak. Namun dengan perencanaan pajak yang dilakukan maka berpengaruh kepada laba sebelum pajak PT. X yang mengalami penurunan sebesar Rp 5.949.228.099 diakibatkan perubahan perhitungan PPh Pasal 21 dari sebelumnya *net method* ke *gross-up method*, yang mengakibatkan biaya gaji meningkat sehingga biaya operasional perusahaan juga meningkat yang berakibat laba komersial perusahaan menurun. Akan tetapi PPh Pasal 21 tersebut dapat dikreditkan untuk mengurangi PPh Pasal 25.

